

DUSTURIYAH

Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

Vol IV No. 2 Juli-Desember 2014

Asuransi dalam Perspektif Islam

Farid Fathony Ashal

Konsep Bughāh dalam Islam Menurut Madzhab Hanafiah

Muthmainnah

Rah Ulei (Tawassul di Kuburan) Menurut Perspektif Ahlussunnah Wal Jama'ah (Studi Kasus di Reubeo Kecamatan Delima)

Muhammad Arifin

Asas dan Materi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Arifin Abdullah

Peran Perguruan Tinggi dan Hubungannya dengan Kebutuhan Sumber Daya Insani (SDI) Pada Lembaga Perbankan Syariah di Banda Aceh

Nilam Sari

Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Kejahatan yang Berusia Lanjut (Studi Kasus Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto Terhadap Nenek Minah)

Rahmat Efendy Al Amin Siregar

Konsep dan Bentuk Multi Akad (Hybrid Contract) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Nevi Hasnita

Sistem Kekerabatan dalam Hukum Keluarga Islam (Tinjauan Tafsir Ayat-ayat Ahkam)

Edi Darmawijaya

Surat Al-Nisa' dan Diskursus Wanita dalam Al-Qur'an

Nurjannah Ismail

Faktor Lingkungan sebagai Determinan Pelanggaran Hukum (Pembuktian Teori Behaviorisme & Kritik Terhadapnya)

Syuhada

Sistem Hukum Peradilan Adat di Aceh

Sitti Mewar

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Ayumiati

ISSN 2088-9712

TIM PENGELOLA JURNAL

DUSTURIYAH

Ketua

Edi Damawijaya, S. Ag., M. Ag.

Wakil Ketua

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH

Sekretaris

Arifin Abdullah, S. HI., MH

Bendahara

Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag

Anggota/Editor

Nevi Hasnita, M. Ag

Israr Hirdayadi, Lc

Syuhada, S. Ag., M. A

Rahmat Efendi Al Amin Sir, S. Ag., MH

Tata Letak/ Grafis

Azkie, S. Kom.

Pembaca Ahli:

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M. A.,
Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D.,
Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A.,
Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag.,
Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed.,
Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Provinsi Aceh 23111

No. Telp: 0651- 7552966

Fax: 0651- 7552966

Email: dusturiyah@gmail.com

<http://www.jurnaldusturiyah.com/>

Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang hukum dan perundang-undangan; hukum, fiqh, ekonomi Islam, politik dan pranata sosial lainnya; Naskah yang dikirim ceketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan jumlah 15-20 halaman; Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CD atau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e mail; Naskah menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris; Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan karunia Allah SWT jurnal Dusturiyah Volume IV No 2 Juli-Desember 2014 ini, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya telah dapat diterbitkan dan tersajikan ke hadapan para pembaca sekalian. Shalawat dan salam kita limpahkan pula kepada baginda Rasulullah Saw yang telah membawa petunjuk kepada seru sekalian alam.

Tulisan yang termuat dalam edisi kedua ini sangatlah beragam, karena memang tim redaksi tidak menentukan tema tulisan yang akan diterbitkan pada edisi kali ini. Diantara tulisan tersebut ada yang membahas tentang, Asuransi dalam Perspektif Islam, Konsep Bughāh dalam Islam Menurut Madzhab Hanafiah, Rah Ulei (Tawassul Di Kuburan) Menurut Perspektif Ahlul-sunnah Wal Jama'ah (studi Kasus di Reubee Kecamatan Delima), Asas dan Materi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dll.

Tim redaksi mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Para penulis, yang telah sudi mengirimkan tulisannya untuk dimuat dalam jurnal Dusturiyah Vol IV No 2. Kesemua tulisan tersebut diharapkan dapat memberi pencerahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum, Fiqh, Tafsir dan Pranata sosial.
2. Kepada para pembaca ahli yang telah memberikan masukan dan kritiknya dalam rangka perbaikan semua tulisan, sehingga hasilnya telah dapat kita baca dikesempatan ini.
3. Kepada pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendukung tim redaksi secara moral dan financial, tanpa dorongan dan dukungan moral yang kuat dari pimpinan sangat kecil kemungkinan edisi ini dapat diterbitkan.
4. Kepada teman-teman yang telah memberikan pikiran dan sarannya sampai dengan suksesnya penerbitan edisi ini

Harapan kita jurnal Dusturiyah yang sangat sederhana ini akan bermakna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian, kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan jurnal ini pada penerbitan berikutnya sangatlah diharapkan. Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri semoga amal ibadah kita diterima dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Amin.

Wassalam

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

Asuransi dalam Perspektif Islam <i>Farid Fathony Ashal</i>	[205-220]
Konsep Bughāh dalam Islam Menurut Madzhab Hanafiah <i>Muthmainnah</i>	[221-236]
Rah Ulei (Tawassul Di Kuburan) Menurut Perspektif Ahlussunnah Wal Jama'ah (studi Kasus di Reubeo Kecamatan Delima) <i>Muhammad Arifin</i>	[237-252]
Asas dan Materi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia <i>Arifin Abdullah</i>	[253-263]
Peran Perguruan Tinggi dan Hubungannya Dengan Kebutuhan Sumber Daya Insani (SDI) Pada Lembaga Perbankan Syariah di Banda Aceh <i>Nilam Sari</i>	[264-286]
Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Kejahatan Yang Berusia Lanjut (Studi Kasus Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri Purwokerto Terhadap Nenek Minah) <i>Rahmat Efendy Al Amin Siregar</i>	[287-298]
Konsep dan Bentuk Multi Akad (Hybrid Contract) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) <i>Nevi Hasnita</i>	[299-315]
Sistem Kekerabatan Kekerabatan Dalam Hukum Keluarga Islam (Tinjauan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam) <i>Edi Darmawijaya</i>	[316-332]
Surat Al-Nisa' dan Diskursus Wanita dalam Al-Qur'an <i>Nurjannah Ismail</i>	[333-353]
Faktor Lingkungan Sebagai Determinan Pelanggaran Hukum (Pembuktian Teori Behaviorisme & Kritik Terhadapnya) <i>Syuhada</i>	[354-370]
Sistem Hukum Peradilan Adat di Aceh <i>Sitti Mawar</i>	[371-388]
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah <i>Ayumiati</i>	[389-404]

PERAN PERGURUAN TINGGIDAN HUBUNGANNYA DENGAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA INSANI (SDI) PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DI BANDA ACEH

Nilam Sari

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) -UIN Ar-Raniry

Email:habibti1971@yahoo.com

Abstrak

Kajian yang bertemakan peran perguruan tinggi dan kebutuhan SDI pada lembaga perbankan syariah di Aceh ini, berangkat dari permasalahan mendasar dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya insani (SDI) yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran Perguruan Tinggi serta metode pembelajaran dalam menyiapkan SDI yang dibutuhkan oleh Industri perbankan Syariah di Aceh. 2) Untuk mengetahui persepsi industri perbankan syariah di Aceh terhadap kompetensi lulusan perguruan tinggi dan profil SDI yang diperlukan. 3) Untuk menganalisis strategi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan kompetensi SDI yang dapat memenuhi kebutuhan Industri perbankan syariah di Aceh. Kesimpulan Berdasarkan Hasil Penelitian yang didapat: 1)Perguruan tinggi sebagai tempat yang melahirkan dan menciptakan lulusan sumber daya insani perbankan syariah, perlu membekali para lulusan dengan berbagai macam keilmuan terkait dengan perbankan syariah, bukan hanya secara teoritis saja, melainkan bersifat praktis juga. Dalam proses pembelajaran, penyusunan kurikulum harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus, rencana pembelajaran, dan evaluasi. 2) Persepsi pihak industri perbankan syariah terhadap kompetensi lulusan perbankan syariah maupun ekonomi syariah di Aceh masih sangat kurang terhadap penguasaan berbagai macam keilmuan, seperti penggunaan teknologi, komunikasi lisan serta penggunaan bahasa asing. Di samping itu, persepsi industri perbankan syariah terhadap lulusan ekonomi syariah bahwa mayoritas lulusan ekonomi syariah di Aceh masih sangat kurang terhadap ilmu-ilmu yang bersifat praktis, seperti pengetahuan tentang produk syariah, tehnik komunikasi market syariah, serta perlu lebih menghayati service excellent yang berjiwa Islami. 3) Adapun strategi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Aceh dalam melahirkan SDI yang dapat memenuhi standard perbankan syariah, seperti perlu adanya peningkatan kemampuan multidisiplin keilmuan serta soft skill. Di samping itu, perlu adanya kegiatan magang dan praktikum yang dilakukan secara sistematis, hal itu bertujuan agar mahasiswa terbiasa dengan praktik perbankan syariah. Serta dalam upaya meningkatkan mata kuliah bermuatan

praktikum, perlu melibatkan praktisi dalam proses pembelajaran dan penyusunan kurikulum akademik, terkait dengan mata kuliah yang tidak penting agar dapat dipangkas dan ditambah dengan mata kuliah substansi perbankan syariah.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Sumber Daya Insani (SDI), Perbankan Syariah

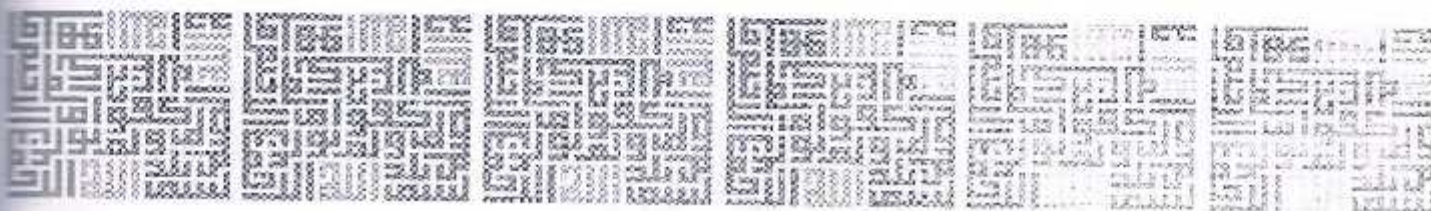
A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ini tentu saja sangat menggembirakan, karena ini merupakan cerminan dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat kita terutama umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah khususnya perbankan Syariah dimulai dengan kelahiran UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang membolehkan praktek perbankan tanpa riba beroperasi di Indonesia. Kemudian, muncullah beberapa Bank Perkreditan Rakyat yang berbasis syariah dan satu bank umum syariah yaitu Bank Muamalah. Pada tahun 1998 Pemerintah kembali menerbitkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ditahun 2008 kembali Pemerintah menyempurnakan regulasi tentang perbankan syariah dengan menerbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang No 21. Tahun 2008 khusus mengatur regulasi perbankan syariah di Indonesia, hal ini merupakan suatu bukti bahwa perkembangan dan kebutuhan akan lembaga Ekonomi syariah telah menjadi komitmen yang tinggi dari Pemerintah.¹

Perkembangan perbankan syariah terus melaju pesat, lebih-lebih setelah pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang serius melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ditahun 2008 kembali Pemerintah menyempurnakan regulasi tentang perbankan syariah dengan menerbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pertumbuhan lembaga perbankan syariah yang begitu pesat, namun penyiapan SDI yang siap untuk masuk dalam industri ekonomi syariah di masa depan menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini dibuktikan bahwa permintaan lulusan ekonomi Syariah, berdasarkan data dari *Institute for Management and Islamic Economic Development (IMIE)*, pada tahun 2012 pasar kerja Indonesia membutuhkan sekitar 50.000 tenaga kerja terlatih di bidang ekonomi, perbankan dan perbankan Syariah. Padahal SDI ekonomi Syariah yang tersedia saat ini hanya baru sekitar 20.000 orang. Kebutuhan akan tenaga

¹ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, Grahtti, 1999), hlm. 157.



kerja terlatih di bidang ekonomi Syariah khususnya perbankan syariah terus meningkat.²

Mantan Deputy Gubernur BI, Siti Fajriyah mengatakan bahwa perkembangan perbankan syariah secara kuantitatif, ternyata tidak didukung dengan ketersediaan SDI yang mencukupi. Kebutuhan SDI untuk bank syariah mencapai 40.000 orang per tahun, sementara lulusan ekonomi syariah sangat terbatas, minimnya stok lulusan perguruan tinggi yang paham dengan ekonomi syariah membuat sebagian bank khususnya yang membuka *office channeling* memilih mentransfer pegawai dari bank konvensional.³

Problematika yang terjadi pada saat ini adalah kekurangan sumber daya insani yang handal dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) diungkapkan bahwa lebih dari 90 % SDI bank syariah saat ini tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah. Hal yang senada juga disampaikan oleh Wahyu Dwi Agung (Mantan Ketua Asbisindo) dan M. Syakir Sula, saat ini hanya 10 % saja SDI yang memiliki latar belakang ekonomi syariah yang bekerja di industri perbankan syariah dan 90 % lagi berlatar belakang dari industri lembaga perbankan konvensional yang di "*karbitkan*" untuk bekerja di lembaga perbankan syariah.⁴

Kendati trendnya terus meningkat, namun persoalan sumberdaya manusia Tidak dapat dipungkiri menjadi kendala agak melambatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, *human intellectual capital* memainkan peran penting dalam mendorong kinerja dan daya saing. Inovasi di industri perbankan secara umum dan perbankan syariah khususnya membutuhkan tersedianya kepakaran (*expertise*) dan keahlian (*skill*). Bukan hanya aspek operasional, tenaga profesional juga diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan guna memperkuat kapasitas dalam berinovasi.⁵

Menurut Syafii Antonio, professional yang dibutuhkan dalam industri perbankan syariah agak unik dibandingkan dengan industri konvensional. Para professional di industri perbankan syariah dituntut memiliki kompetensi keilmuan dan skill yang "men-senyawa-kan" ilmu syariah dan perbankan. Prinsip syariah harus "larut" dalam aspek operasional Lembaga Keuangan

²Laporan Institute for Management and Islamic Economic Development (IMIE), pada September 2012.

³Tim Peneliti UI, "Presentasi Seminar Penelitian UI Tahun 2003", Jakarta: UI, 2008.

⁴Euis Amalia, dkk, :Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia, Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran, dan Hubungan dengan kompetensi SDM Pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta, Gramata Publising, 2012), hlm. 4

⁵Untuk mengetahui lebih jauh ulasan kritis lebih rinci tentang kondisi Indonesia, dibanding dengan Malaysia, lihat tulisan Hans-Dieter Evers, Transition towards a Knowledge Society: Malaysia and Indonesia Compared, downloaded from www.uni-bielefeld.de/de/soz/iw/pdf/Evers_Transition.pdf, pada 14 September 2012.

Syariah (LKS), termasuk dalam mendesain produk-produk perbankan dan struktur perbankan syariah, akad perbankan dan pelaksanaannya, manajemen likuiditas dan neraca, dan manajemen resiko.⁶

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa permasalahan mendasar dalam pengembangan ekonomi syariah adalah masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDI) yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang komprehensif. Permasalahan ini mendorong berbagai kalangan untuk mencari solusi terbaik. Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia adalah melalui lembaga pendidikan. Perguruan tinggi Islam maupun umum memiliki peran yang strategis dalam mencetak SDI yang berkualitas dengan membuka jurusan ekonomi Islam atau perbankan syariah. Pendidikan ini bisa dilakukan secara formal atau informal di lingkungan kampus, seperti mengadakan kajian yang khusus membahas masalah perbankan Islam.

Pihak perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan output yang professional dan berkualitas. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kualitas yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan Islam saat ini. Dari sekian banyak jumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia saat ini, yang membuka jurusan ekonomi atau perbankan syariah jumlahnya masih sangat sedikit. Secara kuantitas, lembaga pendidikan ekonomi syariah saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini dilihat dari jumlah lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ekonomi syariah saat ini masih sekitar 12.5% dari total pegawai yang bekerja di perbankan syariah saat ini. Sementara kebutuhan terhadap sumber daya insani (SDI) dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Selama ini keterbatasan sumber daya insani yang kompeten dalam bidang syariah banyak ditutupi dengan cara menempatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi.

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan Ekonomi Islam. Dari kampuslah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi Islam berasal. Jika melihat masa depan ekonomi Islam, SDI yang dibutuhkan adalah mereka yang tidak hanya faham ekonomi Islam secara filosofis-normatif tapi juga positif-empiris. Dua penguasaan ini tetap harus didukung oleh pembangunan karakter yang baik. Kampus tidak hanya sekedar proses *transfer of knowledge* tapi juga *transfer of character*. Tentunya untuk membangun ini membutuhkan kerjasama semua elemen penyelenggara perguruan tinggi.⁷

6 Svalii Antonio, "Tantangan Profesionalisme Industri Keuangan Syariah" dalam *Citra* edisi Khusus Lebaran 2007 No 48 Tahun XIII, 11-24 Oktober 2007.

7 <http://ekis.pasca.ugm.ac.id>, di Akses Pada Tgl. 08 Juni 2013.



Maraknya lembaga ekonomi syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. Akibatnya, lembaga ekonomi syariah di Indonesia baru pada Islamisasi nama kelebagaannya. Pada dasarnya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sangat berperan dalam pengembangan ekonomi syariah. Karena PTAI merupakan tombak dari kemajuan segala ilmu pendidikan, termasuk ekonomi syariah.

Dalam konteks Aceh, kebutuhan akan SDI yang ahli dibidang ekonomi dan perbankan juga terus meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya bank syariah di Aceh. Menurut Data dari Bank Indonesia (BI), perkembangan bank Syariah di Aceh pada tahun 2011 sangat berkembang pesat, bank Syariah telah mempunyai cabang hampir setiap kabupaten yang ada di aceh.

Perkembangan perbankan syariah di Aceh melaju pesat, dari tahun ke tahun perkembangannya terus bertambah. Bahkan dari tahun 2005 sampai ke 2010, perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Aceh mencapai 100 %. Ini menandakan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Aceh sangatlah pesat.

Namun, yang menjadi problematikanya adalah perkembangan lembaga perbankan syariah di Aceh yang begitu pesat, tidak dibarengi dengan perkembangan SDI yang memadai. Hal ini menyebabkan perkembangan ekonomi syariah hanya sebatas perkembangan lembaga keuangan syariah. Seharusnya perkembangan lembaga perbankan syariah di Aceh harus seimbang dan selaras dengan perkembangan SDI yang handal dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah.

Persoalan SDI adalah hal mendasar yang perlu dicarikan solusinya dan dalam hal ini perguruan tinggi adalah lembaga yang paling berkompeten dalam menyediakan SDI yang dibutuhkan oleh perbankan syariah. Penelitian ini dimaksudkan untuk memotret peta pendidikan Ekonomi Islam, baik Perguruan Tinggi, juga menganalisis hubungan antara kurikulum dan metode pembelajaran ekonomi Islam yang diterapkan di perguruan tinggi dengan kompetensi SDI yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah. Tujuan selanjutnya adalah merumuskan strategi yang tepat dalam menghasilkan kompetensi SDI yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh.

B. Peran Serta Metode Pendidikan di Perguruan Tinggi Dalam Melahirkan Sumber Daya Manusia

Perguruan Tinggi sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Pemerintah No.30 th 1990, yaitu organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. penelitian dan



pengabdian kepada masyarakat.⁸ Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, dan Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.⁹

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cakap ilmu dan menjadi agen perubahan social (*agent social of change*). Perguruan tinggi mengemban budaya akademik yang berpangkal pada Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik yang ada pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi di banding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek, di antaranya aspek social, aspek pembelajaran, aspek kompetensi, dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa hadir di Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang mempersiapkan dan mencetak SDI harus mampu mengantisipasi tuntutan global. SDI yang dihasilkan harus mampu menangkap berbagai tantangan menjadi peluang. SDI yang dihasilkan harus betul-betul yang berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif. Perguruan tinggi harus selalu meng-*update* kurikulum dan strategi pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan harus mengarah pada terciptanya SDI yang unggul sejalan dengan era globalisasi.

Dalam membentuk SDI unggul, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional RI memberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur sendiri kurikulum setiap program studi yang diselenggarakannya (Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 juncto Nomor 045/U/2002). Pendidikan tinggi harus mulai terbuka dan memperhatikan SDI yang akan dihasilkannya. Pemberian bekal dalam ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan sikap (*attitude*), pengembangan diri dan penyiapan mental akan sangat mendukung sekali terhadap terbentuknya manusia unggul yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional.¹⁰

8 http://www.dikti.org/kpptgp/Bab_3.htm

9 Undang-undang No.23 tahun 1999, pasal 1 ttg Perguruan Tinggi

10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 232/U/2000, Tentang

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 58, menegaskan bahwa Peran Perguruan Tinggi adalah sebagai: (1) wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; (2) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; (3) pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan (5) pusat pengembangan peradaban bangsa.¹¹

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang paling penting bagi perkembangan bangsa dan negara, karenanya Pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan bisa lebih dikembangkan bahkan bisa dijadikan sebagai langkah memperkuat SDI.¹²

Perguruan tinggi betul-betul harus menyadari bahwa SDI yang dihasilkannya harus mempunyai daya tawar dan daya saing yang tinggi, sehingga mampu mendapatkan pasar kerja. SDI yang dihasilkan dituntut memiliki pengetahuan dan horizon yang luas. Dengan pengetahuan dan wawasannya yang luas dapat menembus berbagai dimensi, dapat memilih, bahkan menawarkan pilihan-pilihan bagi setiap yang membutuhkannya. SDI pada era globalisasi adalah manusia yang memiliki kualitas kompetitif, mampu berpikir, dan mengenal segala kewajiban dan hak-haknya. Mampu survive dalam kehidupan yang penuh persaingan dengan menghasilkan karya-karya yang unggul dan memberikan manfaat bagi kehidupan sesamanya. HAR menyebutkan bahwa manusia unggul harus memiliki dan dapat mengembangkan sifat-sifat: (1) Mampu mengembangkan jaringan kerja (*networking*), (2) Mampu bekerjasama (*teamwork*), dan (3) Mengutamakan kualitas yang tinggi.¹³

Kebutuhan SDI tersebut tentu bukan hanya tuntutan secara kuantitas tetapi sekaligus kualitasnya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan bersama langkah strategis dan sistematis agar kurikulum berbasis kontekstual dan kompetensi ini dapat diterapkan, sejalan dengan visi dan misi arah pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam lingkup perguruan tinggi. Di antaranya yakni:

Pertama, menjadikan kampus sebagai pusat penelitian dengan metode pendidikan yang bersifat *problem posing*, bukan hanya bersifat *banking education*.¹⁴ Dengan membangun budaya ilmiah dengan menginternalisasi metode penelitian (*laboratorium*) untuk setiap mata kuliah yang diberikan.

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

11Lihat : Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

12 <http://www.gemari.or.id/artikel/2040.shtml>

13 H.A.R. Tilaar. 1999. Beberapa Agenca Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21. Magelang: Indonesia Tera.

14Mubyarto yang disampaikan pada seminar bulanan III Pustep-LGM. Yogyakarta 1

Kedua, memperbanyak pengadaan sumber-sumber penelitian dan kajian ilmiah di setiap perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi ekonomi Islam. Sarananya dapat dimulai dengan mendorong setiap dosen untuk mengadakan penelitian, dan menggunakan hasil-hasil penelitiannya untuk memperkaya bahan-bahan kuliah.

Ketiga, melakukan pengelompokan mata kuliah dan memberikan penekanan pada mata kuliah khusus yang terkait erat dengan pengembangan ekonomi syariah, seperti mata kuliah fikih muamalah, ushul fiqh, dan ekonomi mikro-makro. Keempat, setiap dosen diarahkan untuk memberi pengajaran tidak semata deduktif dari buku-buku teks, tetapi harus bersama-sama mahasiswanya mengadakan penelitian induktif-empirik dengan sekaligus mempelajari kajian klasik sejarah pemikiran ekonomi dan perekonomian. Hal ini dapat dibangun dengan lingkungan yang mendukung seperti penyediaan laboratorium bahasa dan statistik, dan peningkatan kompetensi dan layanan konsultasi dosen pembimbing.

C. Peran Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan SDI Perbankan Syariah

Untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkompoten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah secara komprehensif dan memadai serta memiliki integritas yang tinggi, maka dibutuhkan lembaga pendidikan ekonomi syariah yang secara khusus menyiapkan sumber daya insani ekonomi syariah. Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang harus bertanggung jawab dalam menghasilkan sumber daya manusia keuangan syariah yang berkualitas.

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan Ekonomi Islam. Dari kampuslah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi Islam berasal. Jika melihat masa depan ekonomi Islam, SDI yang dibutuhkan adalah mereka yang tidak hanya faham ekonomi Islam secara filosofis-normatif tapi juga positif-empiris. Dua penguasaan ini tetap harus didukung oleh pembangunan karakter yang baik. Kampus tidak hanya sekedar proses *transfer of knowledge* tapi juga *transfer of character*. Tentunya untuk membangun ini membutuhkan kerjasama semua elemen penyelenggara perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhyan Yunan, salah seorang praktisi pada Bank BNI Syariah menguraikan bahwa "perkembangan ekonomi syariah semakin hari semakin mengesankan untuk itu suka atau pun tidak kita



harus menyongsong era tersebut dengan menyiapkan sumberdaya insaninya dan meningkatkan pemahaman ekonomi syariah masyarakat”.¹⁵

Lebih lanjut Muhyan juga menjelaskan bahwa “dalam hal ini peran perguruan tinggi bukan hanya di Aceh, tetapi juga seluruh di Indonesia sangat diharapkan mampu melahirkan sarjana-sarjana ekonomi syariah yang memiliki pemahaman syariah yang utuh dan profesional. Industri keuangan syariah juga harus bertanggung jawab atas lahirnya sistem dan pengelola yang professional”.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pada saat sekarang ini, perkembangan bank syariah yang begitu pesat di Aceh tidak sejalan dengan perkembangan sumber daya ekonomi syariah. Semestinya, perkembangan perbankan syariah juga harus di dukung oleh perkembangan sumber daya perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhyan Yunan juga menjelaskan bahwa “salah satu problematika mendasar yang dihadapi oleh perbankan syariah di Aceh maupun di Indonesia adalah masih minimnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis pada syariah Islamiyyah”.¹⁷

Pada dasarnya, dalam konteks Aceh, tingginya kebutuhan sumber daya insani perbankan syariah, tentunya Perguruan Tinggi baik perguruan tinggi agama, maupun umum, bank swasta maupun negeri dituntut untuk dapat melahirkan sumber daya insani perbankan syariah yang professional dan handal dalam bidang keuangan Islam.

Lebih lanjut, Muhyan juga menjelaskan bahwa “dalam konteks Aceh saat ini, perlu kiranya membangun institusi pendidikan ekonomi syariah yang berkualitas. Untuk melakukan hal tersebut, tentu saja tidaklah mudah. Dibutuhkan adanya kerja keras dan perencanaan yang matang, agar output yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada”.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk dapat melahirkan sumber daya perbankan syariah yang professional di Aceh, tentunya perlu membangun sebuah institusi ekonomis syariah yang berkualitas dan mempunyai integritas yang tinggi, kampus atau perguruan tinggi di tuntut untuk dapat mewujudkan hal tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dedi Novendi, Praktisi Bank Aceh Syariah ini juga menguraikan bahwa “menurut saya yang sangat penting

15 Muhyan Yunan, Praktisi BNI Syariah, Wawancara, 22 Juli 2014.

16Ibid.

17Ibid.

18Ibid.

untuk menyongsong era ekonomi Islam adalah manusianya atau sumber daya insaninya. Kita melihat ada kesenjangan antara pesatnya pertumbuhan dan keterbatasannya sumber daya manusia yang tersedia".¹⁹

Terkait dengan peran perguruan tinggi di Aceh dalam melahirkan sumber daya insani yang potensial dalam meningkatkan perbankan syariah, Dedi Novendi menjelaskan bahwa "menurut saya, beberapa perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi syariah di Aceh sangat baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan percepatan-percepatan peningkatan industri perbankan di Aceh".²⁰

Lebih lanjut Dedi Novendi juga menjelaskan bahwa "perguruan tinggi di Aceh dituntut untuk dapat menyiapkan tenaga-tenaga siap pakai untuk kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar saat ini. Perguruan tinggi harus membuka diploma-diploma perbankan syariah untuk menyiapkan pekerja-pekerja yang siap pakai. Makanya perguruan tinggi di Aceh harus bisa akselerasi dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah".²¹

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa Perguruan Tinggi (PT) di Aceh berperan penting untuk dapat melahirkan sumber daya insani perbankan syariah dalam konteks Aceh. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat di Aceh dari tahun ke tahun, sehingga pihak stakeholder, yakni perbankan syariah di Aceh menuntut agar kampus dapat melahirkan sumber daya perbankan syariah yang profesional.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Muhammad Iqbal, Ketua Prodi Perbankan Syariah Unida menguraikan bahwa "perguruan tinggi, khususnya Unida telah melakukan berbagai macam hal dalam meningkatkan serta melahirkan sumber daya manusia perbankan syariah yang handal seperti menyusun kurikulum perkuliahan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar perbankan syariah, serta menghadirkan pengajar dari kalangan praktisi, langsung dari pihak perbankan syariah serta menjalin kerjasama dengan berbagai macam bank syariah yang ada di Aceh".²²

Lebih lanjut M. Iqbal juga menguraikan bahwa "meskipun demikian, minimnya sumber daya manusia, khususnya pengajar yang profesional dalam bidang perbankan syariah juga menjadi salah satu kendala, namun perguruan tinggi Unida, telah melakukan berbagai macam upaya untuk dapat meningkatkan kompetensi lulusan nantinya".²³

19 Dedi Novendi, Praktisi Bank Aceh Syariah, Wawancara, 22 Agustus 2014.

20Ibid

21Ibid.

22 Muhammad Iqbal, Ketua Prodi Perbankan Syariah Unida, Wawancara, 12 September 2014.

23Ibid.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pada dasarnya, hampir semua perguruan tinggi yang membuka prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah juga melakukan hal yang sama dalam meningkatkan kompetensi lulusannya. Perguruan tinggi melakukan berbagai macam perannya dalam melahirkan sumber daya insani perbankan syariah, seperti menyusun kurikulum perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta menjalin kerjasama dengan berbagai macam pihak perbankan syariah.

Disamping itu, perguruan tinggi sebagai tempat yang melahirkan dan menciptakan lulusan sumber daya ekonomi syariah, juga perlu membekali para lulusan yang nantinya akan menjadi sumber daya insani di perbankan syariah agar membekali mereka dengan berbagai macam pengetahuan terkait dengan perbankan syariah, bukan hanya secara teoritis saja, melainkan bersifat praktis juga.

Peran yang paling penting yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Aceh agar dapat bersinergi dengan perbankan syariah yang ada di Aceh, dengan tujuan agar kiranya lulusan nanti mempunyai pemahaman dan keilmuan yang cukup untuk menjadi bagian dari sumber daya insani perbankan syariah. Tentunya, perguruan tinggi harus dapat meningkatkan peran aktifnya dalam melahirkan sumber daya insani perbankan syariah.

D. Metode Pembelajaran Ekonomi Syariah Yang Diterapkan Di Perguruan Tinggi di Aceh

Pada tataran teoritis dan konseptual, kita masih merasakan sangat kekurangan SDI yang benar-benar mendalami ilmu ushul fikih, fikih muamalah, qawa'id fikih dan sekaligus ilmu ekonomi keuangan modern. Figur seperti ini benar-benar langka bukan saja bagi masyarakat Islam di Indonesia melainkan juga di banyak negara termasuk negara lain yang perkembangan ekonomi Islamnya cukup pesat. Kebanyakan SDI perbankan syariah saat ini adalah mereka yang fasih berbicara tentang ilmu ekonomi keuangan kontemporer, tetapi awam dalam ushul fiqh atau fiqh muamalah. Sebaliknya banyak pakar yang mahir dalam fikih dan usul fiqh tetapi kurang memahami tentang ilmu ekonomi keuangan.

Untuk melahirkan SDI yang berkompeten di bidang ekonomi, bisnis dan hukum ekonomi syaria'ah secara komprehensif dan memadai, serta memiliki integritas tinggi, maka dibutuhkan lembaga pendidikan ekonomi syaria'ah yang secara khusus menyiapkan SDI ekonomi syaria'ah. SDI ekonomi syaria'ah, tidak boleh lagi bersifat bukan karbitan seperti yang banyak terjadi selama ini.

Lembaga pendidikan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam menghasilkan SDI keuangan syariah yang berkualitas. Dalam pengembangan



pendidikan ekonomi keuangan syariah di masa yang akan datang setidaknya ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius, seperti kurikulum yang tepat; mengkombinasikan mata kuliah yang memberikan pengetahuan profesionalitas ekonomi/ keuangan/perbankan/bisnis dan pengetahuan syariah (hukum & aplikasi) serta nilai-nilai moral (akidah & akhlak).

Dalam penyusunan kurikulum perlu melibatkan seluruh potensi prodi, untuk mencapai sebuah dinamika dari inovasi yang dibutuhkan agar kurikulum tetap aktual dan terintegrasi dengan sistem pembelajaran dan memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi dari suatu mata kuliah. Penyusunan kurikulum itu merupakan wujud untuk membentukkan *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang akan diaplikasikan dalam proses pembelajaran.

Kurikulum yang telah disusun memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus, rencana pembelajaran, dan evaluasi.

Kebutuhan terhadap evaluasi dan revisi kurikulum itu dilakukan dengan pertimbangan tuntutan perkembangan zaman serta kebutuhan pasar khususnya industri keuangan syariah, dan yang terpenting adalah membekali para mahasiswa agar ilmu yang mereka peroleh dapat diterapkan dengan baik di dunia kerja, sehingga setiap output yang dihasilkan oleh Program Studi perbankan syariah maupun ekonomi syariah mampu bersaing dalam bursa dunia kerja yang sangat kompetitif, bahkan mampu menjadi wira usaha mandiri yang mumpuni berani menunjukkan ciri sebagai pelaku ekonomi dan bisnis syariah.²⁴

Dalam penyusunan kurikulum ekonomi syariah harus mengedepankan kesepahaman bahwa kurikulum tersebut merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi.²⁵

24Lina, Muhammad Maulana, dkk, Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Pada Jurusan wal Iqtishad (SMI), Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, 2013, lihat juga Konklusi dari Pemaparan Ridwan Nurdin, Dosen Prodi HES dalam FGD Kurikulum Prodi HES, pada tanggal 23 Juni 2013 di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

25Hasil Penyampaian pendapat Amiadi pada FGD Kurikulum Prodi HES, pada tanggal 23 Juni 2013 di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.



Ada beberapa komponen standar yang harus diperhatikan sebagai elemen dalam penyusunan kurikulum perbankan syariah maupun ekonomi syariah, yaitu:

- a. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.
- b. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian
- c. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester (sks)
- d. Kurikulum harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan kepada pebelajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan rencana pembelajaran.
- e. Kurikulum pada masing-masing program studi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- f. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
- g. Kurikulum pada masing-masing program studi wajib memuat Mata Kuliah keahlian kompetensi yang merupakan mata kuliah khas program studi yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan.
- h. Kurikulum harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hardskills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*softskills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
- i. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak yang terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- j. Kurikulum yang diberlakukan untuk Program Sarjana Strata-1 berjumlah 144 – 160 SKS, sedangkan untuk Program Diploma-III berjumlah 110 – 120 SKS.
- k. Beban SKS efektif program Sarjana Strata-1 berjumlah 148 sks, sedangkan untuk program Diploma III berjumlah 120 sks.

- l. Kalender akademik merupakan panduan pelaksanaan kegiatan akademik selama satu tahun akademik yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap.
- m. Kalender akademik harus memuat jenis dan waktu kegiatan yaitu jadwal Registrasi; Awal dan Akhir Perkuliahan; Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester; Semester Pendek; Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi; Kegiatan Wisuda dan Libur Semester.²⁶

Dengan demikian, untuk mewujudkan SDI yang berkualitas dalam bidang perbankan syariah maupun ekonomi syariah, tentunya perguruan tinggi di Aceh harus mampu menyusun kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Perlunya menyeimbangkan antara praktis dan teoritis, sehingga nantinya lulusan perguruan tinggi di Aceh mempunyai kompetensi yang diharapkan oleh industri perbankan syariah.

E. Persepsi Industri Perbankan Syariah Di Aceh Terhadap Kompetensi Lulusan Ekonomi Syariah Di Aceh

Pada dasarnya, perkembangan perbankan syariah di Aceh yang begitu pesat dari tahun ke tahun, tentunya memerlukan sumber daya manusia dalam operasionalnya. Salah satu lembaga penyuplai sumber daya manusia perbankan syariah adalah perguruan tinggi.

Dalam konteks Aceh saat ini, perkembangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti jamur di musim hujan yang tumbuh dimana-mana. Artinya, perkembangan bank syariah saat ini sudah berkembang pesat dengan munculnya berbagai macam bank syariah. Hal ini tentunya pasti memerlukan sumber daya insani perbankan syariah yang profesional.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan terhadap kompetensi lulusan ekonomi syariah di Aceh mendapati bahwa masih banyak lulusan ekonomi syariah di Aceh yang bekerja di bank syariah belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam menjalankan operasional bank syariah. Tak jarang ditemui lulusan ekonomi syariah di Aceh yang kurang bisa memberikan penjelasan yang benar dan akurat. Sehingga menimbulkan keraguan bagi calon nasabah untuk menggunakan produk dan layanan bank syariah. Bahkan penjelasan yang sembrono memunculkan anggapan keliru tentang bank syariah, sehingga akan memengaruhi pencitraan bank syariah.

Untuk mengetahui persepsi stakeholder, khususnya industri perbankan syariah, peneliti melakukan wawancara dengan Yusnardi yang merupakan praktisi Bank Syariah Mandiri di Aceh menguraikan bahwa "pada dasarnya,

²⁶Muhammad Maulana, dkk, *Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Pada Jurusan wal Iqtiṣhad (SMT)*, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, 2013.

yang menjadi kelemahan bagi lulusan ekonomi syariah di Aceh adalah kurangnya memahami perbankan syariah secara praktis, seperti memahami tentang produk-produk perbankan syariah, seperti produk-produk inovasi, serta pengetahuan mereka dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dan lain-lain, akan tetapi secara teoritis mereka lebih kuat, namun secara praktis saja agak sedikit lemah”.²⁷

Lebih lanjut Yusnardi juga menjelaskan bahwa “mungkin selama di kampus mereka kurang dibekali dengan ilmu-ilmu tersebut, sehingga ketika mereka kerja di perbankan syariah, mereka akan menjadi kewalahan dengan ilmu-ilmu tersebut, seharusnya kampus harus menekankan ilmu-ilmu yang bersifat praktis juga”.²⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi user atau pihak industri perbankan syariah terhadap kompetensi lulusan ekonomi syariah di Aceh masih sangat minim terkait dengan hal-hal yang bersifat praktis. Lemahnya pengetahuan mereka terhadap hal yang bersifat praktis tersebut disebabkan selama masa perkuliahan, kurikulum di perguruan tinggi kurang menekankan hal tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dedi Novendi, beliau menguraikan bahwa “*masih ada beberapa lulusan ekonomi syariah di Aceh yang masih kurang terhadap kemampuan untuk penguasaan keahlian teknis, seperti perbankan, keuangan, akuntansi, SDI, produk development termasuk syariah. Selain itu, SDI Syariah sesungguhnya harus menguasai fiqh dengan baik, menguasai produk development syariah dan berkemampuan komunikasi saat SDI itu melakukan marketing*”²⁹

Lebih lanjut Dedi juga menjelaskan bahwa “terkait dengan lulusan ekonomi syariah di Aceh, mayoritasnya secara praktis mereka masih sangat lemah, lebih-lebih terhadap akuntansi bank, pelayanan bank, serta pemahaman terhadap praktis perbankan, sehingga mereka yang direkrut menjadi karyawan harus dibekali ilmu-ilmu tersebut, seharusnya lulusan ekonomi syariah di Aceh harus siap pakai, dan hanya perlu pematangan saja”.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pihak industri perbankan syariah menilai bahwa mayoritas lulusan ekonomi syariah di Aceh belum mempunyai kompetensi yang cukup untuk menjadi praktisi perbankan syariah. Sehingga mereka perlu adanya pembelakalan lebih lanjut disaat mereka berhubungan dengan perbankan syariah.

27 Yusnardi, Praktisi Bank Syariah Mandiri (BSM), Wawancara, 28 Agustus 2014.

28Ibid.

29 Dedi Novendi, Wawancara, 22 Agustus 2014.

30Ibid.



Pada dasarnya, industri perbankan syariah menginginkan sumber daya insani perbankan syariah yang mempunyai multi talenta. Artinya, sumber daya insani perbankan syariah dituntut untuk dapat mempunyai berbagai macam skill guna dalam meningkatkan serta memajukan perbankan syariah.

Selain aspek teknis, ada beberapa aspek lain yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh sumber daya insani perbankan syariah. Menurut Muhyan Siregar menjelaskan bahwa "aspek kemampuan untuk dapat bekerja secara mandiri merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam porsi mata kuliah. Begitu juga dengan aspek berkomunikasi lisan, setiap lulusan perlu kiranya dibekali ilmu komunikasi yang baik. Begitu juga dengan penggunaan teknologi, mahasiswa perlu dibekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Hal yang paling terpenting adalah penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Mahasiswa harus mendapatkan porsi yang lebih terhadap pementapan bahasa Arab. Karena bahasa Arab sangat penting, lebih-lebih bahasa Arab menjadi referensi utama terkait dengan hukum ekonomi syariah".³¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, persepsi pihak industri perbankan syariah terhadap kompetensi lulusan ekonomi syariah di Aceh masih sangat kurang terhadap penguasaan berbagai macam keilmuan, seperti penggunaan teknologi, komunikasi lisan serta penggunaan bahasa asing.

Lebih lanjut Mulyan menjelaskan bahwa "perbankan syariah tentunya memerlukan karyawan yang mempunyai kualifikasi yang baik, kualifikasi yang saya maksudkan mempunyai keahlian akuntansi syariah, pembukuan perbankan, serta hal-hal lain yang bersifat teknis perbankan syariah. Banyak lulusan ekonomi syariah yang paham secara teoritis tentang muamalah, tetapi ketika mereka bergabung dalam dunia kerja mereka kewalahan, disebabkan kurangnya ilmu praktek".³²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pihak industri perbankan syariah di Aceh terhadap lulusan ekonomi syariah bahwa mayoritas lulusan ekonomi syariah di Aceh masih sangat kurang terhadap ilmu-ilmu yang bersifat praktis.

Kedepan, agar problem ini tidak berkepanjangan, diharapkan SDI perbankan syariah perlu memperdalam tentang keuangan syariah dan ragamnya, serta menguasai keterampilan dasar ilmu syariah. Seperti pengetahuan tentang produk syariah, tehnik komunikasi market syariah, serta perlu lebih menghayati mengenai service excellent yang berjiwa Islami.

31 Muhyan Siregar, Wawancara, 22 Agustus 2014.

32Ibid.

F. Strategi Yang Perlu Dilakukan Untuk Menghasilkan Kompetensi SDI Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Perbankan Syariah Di Aceh

Minimnya *skills* dan *kognisi* (keilmuan) sumber daya insani (SDI) di bidang perbankan syariah ini menimbulkan dampak negatif yang serius, antara lain implementasi syariah Islam dalam perbankan menjadi tidak optimal. Akibatnya lainnya ialah pengembangan produk-produk yang benar-benar memiliki landasan syariah yang kuat dan sekaligus memiliki keandalan bisnis menjadi terhambat. Padahal, idealnya pengembangan produk ini harus bisa membawa masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang mengikuti syariah, terutama dalam pertanian, perdagangan, investasi, dan perkebunan.

Untuk mengatasi problematika tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu memberikan kontribusi lebih dalam peningkatan perbankan syariah. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang berbagai macam strategi dalam menghasilkan kompetensi SDI perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan perbankan syariah.

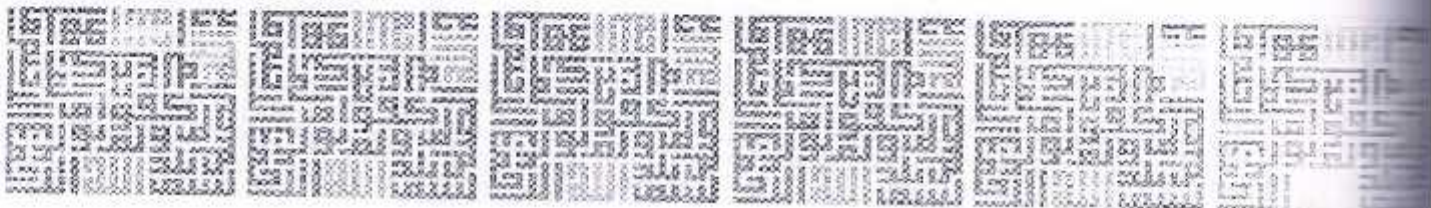
Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusnardi, beliau menguraikan bahwa "salah satu strategi dalam menghasilkan lulusan perbankan syariah yang handal dimana kampus dituntut untuk dapat bekerja ekstra keras dalam melahirkan lulusan yang profesional, bukan hanya itu perlu juga meningkatkan mata kuliah yang bersifat praktek kepada mahasiswa".³³

Lebih lanjut Yusnardi juga menjelaskan bahwa "hal yang terpenting lainnya dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas adalah dengan meningkatkan kemampuan multidisiplin, *softskill*, dan pengalaman lapangan harus ditingkatkan dalam proses pembelajaran di kampus, karena hal tersebut merupakan kemampuan penting dan dihargai tinggi oleh dunia kerja. Disarankan untuk memperbaiki dan menyempurnakan komponen-komponen tersebut melalui kegiatan seperti magang dan PBL yang disusun secara lebih sistematis, efektif, efisien. Demikian juga dengan struktur mata kuliah yang ada agar lebih banyak memasukkan aspek praktikal dan situasi terkini yang ada di lapangan".³⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Aceh dalam melahirkan SDI yang dapat memenuhi standard perbankan syariah, seperti perlu adanya peningkatan kemampuan multidisiplin keilmuan serta *soft skill*. Di samping itu, perlu juga adanya kegiatan magang dan praktikum yang dilakukan secara sistematis, hal itu bertujuan agar mahasiswa terbiasa dengan hal yang bersifat praktis dalam perbankan syariah.

³³Yusnardi, Ibid.

³⁴Muhyar, Ibid.



Ketersediaan tenaga kerja yang menguasai operasi perbankan syariah. Antara kebutuhan tenaga kerja yang menguasai operasi perbankan syariah dengan yang tersedia di pasar tenaga kerja sangat timpang. Dalam kenyataannya cukup banyak tenaga kerja yang menguasai hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat, tetapi masalahnya kurang menguasai tentang konsep-konsep ekonomi dan bisnis yang dapat diterapkan dalam dunia perbankan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhyan, beliau menguraikan bahwa "untuk dapat melahirkan lulusan perbankan syariah yang berkualitas, kampus harus membekali mahasiswa akidah dan kejujuran, selanjutnya mereka memang harus betul-betul memahami ekonomi syariah, konsep-konsep ekonomi Islam, serta tentang perbankan syariah, dan operasional perbankan syariah, baik secara praktis maupun teoritis".³⁵

Terkait dengan strategi dalam menghasilkan lulusan perbankan syariah yang berkualitas di Aceh, menurut Dedi Novendi menguraikan bahwa "menurut saya beberapa mata kuliah yang tidak berkenaan atau kurang relevan, seperti ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar dan lain-lain, saya rasa itu menghabiskan waktu saja, saran saya itu di pangkas saja mata kuliah seperti itu dan digantikan dengan mata kuliah yang lebih relevan dan praktek-praktek lapangan. Saya rasa komposisi teoritis dan praktek itu perlu diseimbangkan, pemahaman teori itu penting, tapi ilmu praktek juga penting. Perguruan tinggi harus mampu menciptakan jaringan yang lebih kuat dengan pihak swasta, sehingga secara teoritis dan praktek bisa diseimbangkan kepada mahasiswa dalam menghasilkan lulusan yang baik. Saya rasa ilmu praktek itu perlu dipercepat kepada mahasiswa, jangan semester akhir, akan tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Diharapkan SDI perbankan syariah perlu memperdalam tentang keuangan syariah dan ragamnya, serta menguasai keterampilan dasar ilmu syariah".³⁶

Lebih lanjut, Dedi Novendi juga menguraikan bahwa "strategi lain yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Aceh perguruan tinggi perlu melakukan kerja sama dengan praktisi ekonomi syariah dengan institusi bisnis. Perlu adanya kerja sama pihak swasta yang terkait. Jadi kerja sama dengan pihak luar sangatlah penting untuk dilakukan oleh perguruan tinggi. Sehingga nantinya lulusan mahasiswa perbankan syariah memahami tentang pasar ekonomi syariah".³⁷

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa ada berbagai macam strategi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk dapat

³⁵Ibid.

³⁶ Dedi Novendi, Wawancara, 28 Agustus 2014.

³⁷Ibid



menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam bidang ekonomi syariah, seperti meningkatkan mata kuliah praktek, serta perlu juga melibatkan praktisi dalam proses pembelajaran, terkait dengan mata kuliah yang tidak penting agar dapat dipangkas dan ditambah dengan mata kuliah substansi perbankan syariah.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Yusnardi, pendidikan perbankan syariah di Perguruan Tinggi seperti di UIN atau kampus lainnya, tidak hanya untuk mendalami secara fiqhiyahnya saja, tapi juga harus mempersiapkan khusus untuk kebutuhan industri. Jadi selain pengetahuan agama, pengetahuan umum, ada juga dibekali ilmu terapan praktisnya. Makanya saya kira, semua pihak harus melakukan sosialisasi secara terencana secara konseptual dan efektif³⁸.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa lulusan pendidikan perbankan syariah diharapkan tidak hanya memahami secara teoritis saja, melainkan harus dapat memahami secara praktis juga tentang perbankan syariah. Perlu juga memahami tentang pengetahuan umum yang bersifat praktis.

Di samping semua hal tersebut, ada strategi lain yang lebih penting yang harus dilakukan, yakni pembenahan kurikulum pendidikan perbankan syariah. Faktor yang mempengaruhi kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan adalah faktor kurikulum yang menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan. Dikarenakan kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa.

Di samping itu, perguruan tinggi juga harus menyusun buku pedoman pelaksanaan kurikulum perbankan syariah. Kegiatan pendidikan di perguruan tinggi yang mengajarkan perbankan syariah harus diwujudkan secara bersama-sama antara dosen dan pihak pimpinan. Oleh yang demikian, sudah seharusnya lembaga pendidikan perbankan syariah harus mempunyai buku pedoman yang standard dan update terhadap perkembangan perbankan syariah.

Disamping itu, perlu diintegrasikan antara teori dan praktek, bagi lembaga pendidikan perbankan syariah yang ingin melahirkan lulusan yang profesional dalam bidang ekonomi syariah, kurikulum pembelajaran perbankan syariah harus dirancang secara seimbang antara teori dan praktek. Penyusunan kurikulum perbankan syariah yang ideal hendaknya mencakup sejumlah hal-hal berikut :

1. Kurikulum berbasis kompetensi, harus ada pembedan kurikulum untuk calon praktisi dengan kurikulum calon akademisi.
2. Kurikulum harus mengintegrasikan nilai-nilai syariah, terutama masalah fiqh muamalah dengan materi kuliah ekonomi keuangan secara komprehensif.

38 Yusnardi, Wawancara, 2 Agustus 2014.



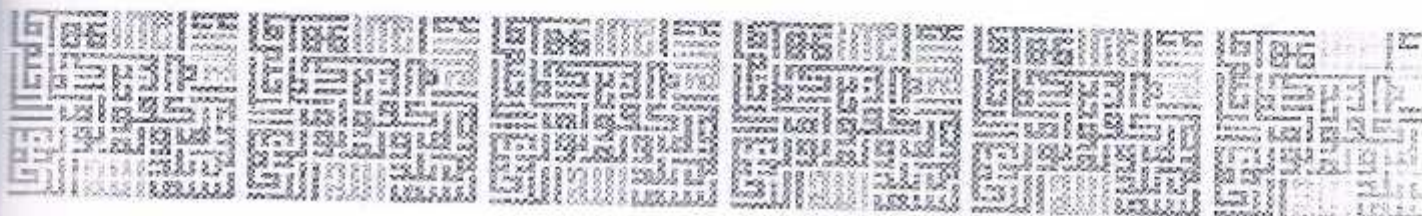
3. Kurikulum harus membekali mahasiswa dengan ilmu-ilmu kuantitatif terkait dengan pengembangan nalar dan logika.
4. Kurikulum harus mengintegrasikan antara teori dan praktek.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa salah satu hal yang terpenting dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, dimana perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang strategi yang tepat dengan cara merancang kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta harus dapat mengintegrasikan antara teori dan praktek.

G. Penutup

Kesimpulan

1. Perguruan tinggi sebagai tempat yang melahirkan dan menciptakan lulusan sumber daya insani perbankan syariah, juga perlu membekali para lulusan dengan berbagai macam keilmuan terkait dengan perbankan syariah, bukan hanya secara teoritis saja, melainkan bersifat praktis juga. Peran yang paling penting yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Aceh agar dapat bersinergi dengan perbankan syariah yang ada di Aceh, dengan tujuan agar kiranya lulusan nanti mempunyai pemahaman dan keilmuan yang cukup untuk menjadi bagian dari sumber daya insani perbankan syariah. Tentunya, perguruan tinggi harus dapat meningkatkan peran aktifnya dalam melahirkan sumber daya insani perbankan syariah. Dalam proses pembelajaran, penyusunan harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus, rencana pembelajaran, dan evaluasi.
2. Persepsi pihak industri perbankan syariah terhadap kompetensi lulusan perbankan syariah maupun ekonomi syariah di Aceh masih sangat kurang terhadap penguasaan berbagai macam keilmuan, seperti penggunaan teknologi, komunikasi lisan serta penggunaan bahasa asing. Di samping itu, pihak industri perbankan syariah juga mempunyai persepsi terhadap lulusan ekonomi syariah bahwa mayoritas lulusan ekonomi syariah di Aceh masih sangat kurang terhadap ilmu-ilmu yang bersifat praktis, seperti pengetahuan tentang produk syariah, teknik mengkomunikasikan market syariah, serta perlu menghayati mengenai service excellent yang berjiwa Islami.
3. Adapun strategi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Aceh dalam melahirkan SDI yang dapat memenuhi standard perbankan syariah, seperti perlu adanya peningkatan kemampuan multidisiplin keilmuan serta soft



skill. Di samping itu, perlu juga adanya kegiatan magang dan Praktikum yang dilakukan secara sistematis, hal itu bertujuan agar mahasiswa terbiasa dengan hal yang praktis dalam perbankan syariah. Serta meningkatkan mata kuliah praktek, dan perlu melibatkan praktisi dalam proses pembelajaran dan penyusun kurikulum akademik, terkait dengan mata kuliah yang tidak penting agar dapat dipangkas dan ditambah dengan mata kuliah substansi perbankan syariah.

Saran

1. Hendaknya perguruan tinggi di Aceh perlu mengambil perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dalam melahirkan sumber daya insani perbankan syariah sebagaimana yang diharapkan oleh industri perbankan syariah.
2. Dalam penyusunan kurikulum perkuliahan tentang perbankan syariah, perlu kiranya melibatkan pihak user (industri perbankan syariah) sehingga kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi di Aceh sinkron dengan kebutuhan pasar industri perbankan syariah.
3. Dalam proses pembelajaran, perlu kiranya melibatkan praktisi dari perbankan syariah maupun non perbankan, sehingga mahasiswa dapat memahami nilai-nilai praktik dalam proses pembelajaran.
4. Hendaknya pihak perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan berbagai macam pihak perbankan syariah, baik yang ada di Aceh maupun di Indonesia, agar lulusan perbankan syariah nantinya dapat ditampung oleh industri perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Euis Amalia, dkk, :Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia, Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran, dan Hubungan dengan kompetensi SDI Pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta, Gramata Publishing, 2012).
- Herdiansyah Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Cet III (Jakarta: Salemba Humanika,2012).
- IDB, Annual Report IDB Tahun 2008, Jeddah: IDB, 2008
- Jaafar Muhammad (2003) Asas Pengurusan Perniagaan, Selangor: Fajar Bakti Sdn Bhd.
- Laporan Institute for Management and Islamic Economic Development (IMIE), pada September 2012.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Perbankan Lainnya, Divisi *Buku* Perguruan Tinggi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Khairul Umam, Manajemen Organisasi, (Bandung :Pustaka Setia,2012).
- Kepmendiknas No.232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.
- Muhammad Najib Abdul Ghaf), Penyelidikan Pendidikan, Johor Bahru: Penerbit UTM, 1999.
- Nana Saedih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum dan Praktek,(Bandung:PT Remaja Rosda Karya,2005).
- Nur A.Fadhil Lubis, "pengembangan Studi Ekonomi Islam di PTAIN: Studi Kasus di IAIN SU Medan", makalah, 2012.
- Sultan Remy Sjahdini, Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta, Grafiti, 1999).
- Suharmisimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, c.1. (Jakarta Rineka Cipta, 1997).
- Syafii Antonio, Tantangan Profesionalisme Industri Perbankan Syariah" dalam Gatra edisi Khusus Lebaran 2007 No 48 Tahun XIII,11-24 Oktober 2007.
- <http://ekis.pasca.ugm.ac.id>, di Akses Pada Tgl. 08 Juni 2013.
- Veithzal rivai dan Andi Bukhari, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi (Jakarta:Bumi Aksara,2009).
- Tim Peneliti UI, "Presentasi Seminar Penelitian UI Tahun 2003", Jakarta: UI, 2008.
- Undang-undang No.23 tahun 1999, pasal 1 ttg Perguruan Tinggi
- UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[www.uni-biedefeld.de/\(de\)/soz/iw/pdf/Evers_Transition.pdf](http://www.uni-biedefeld.de/(de)/soz/iw/pdf/Evers_Transition.pdf) pada 14
September 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia. Di akses pada 02 April
2014.

http://www.dikti.org/kpptgp/Bab_3.htm.

<http://www.dikti.org/kpptgp>.